

PEREMPUAN MADURA PESISIR MERETAS BUDAYA MODE PRODUKSI PATRIARKAT

Achmad Mulyadi

(Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan Km. 4 e-mail: mulya_ach@yahoo.co.id)

Abstrak:

Dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua pelayanan untuk suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya dan di luar rumah tangga, laki-laki mengendalikan dan membatasi peran publik perempuan. Fenomena ini oleh *mode produksi patriarkat* yang merugikan kaum perempuan. Peran perempuan dibatasi pada tugas-tugas domestik, yaitu sekitar "sumur, dapur dan kasur". Peran ini dianggap sebagai hal ideal bagi seorang perempuan. Walau masih berakar kuat pada sebagian masyarakat, paradigma ini mulai ditolak seiring dengan gerakan emansipasi wanita. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Branta Pesisir, keterlibatan istri nelayan mereka dalam wilayah publik sudah mentradisi secara turun tenurun. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana mereka menabrak ortodoksi dan menakar realitas dengan meretas budaya produksi patriarkat.

Kata kunci:

peran, relasi, suami-istri, dan patriarkat

Abstract:

In the family, a woman contributes her whole potencies to her husband, children, and the other family members, on the other hand, a man takes controll and limits the public role of woman. Sylvia Walby name this phenomena as patriarchal-production mode that disservice the woman. The role of woman has been measured up by domestic jobs, it goes around bathroom, cooking room, and bed room. These roles are considered ideal for woman. This paradigm is deep-rooted in certain community, however, at the present time this has been resisted by woman emansipation movement. This article is based on the study at Baranta Pasisir women and about to explore the role of fishermen's wives in public domain. They demonstrate how they hit orthodox beliefs and mete the reality out by taking apart the patriarchal-cultural products.

Key words:

dynamics, relation, husband-wife, patriarchat

Pendahuluan

Secara tradisional, pola keluarga patriarki menempatkan istri sebagai pihak yang mengurus pekerjaan domestik. Sistem patriarki dalam sejarah gender merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi segenap manajemen senantiasa menggantungkan perusahaan (*survival*) keluarga kepada laki-laki (suami), sementara perempuan (istri) menempatkan diri pada penerimaan serta pembelanjaan keluarga. Perempuan dianggap sebagai bagian penting faktor domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan pada posisi publik.

Dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua pelayanan untuk suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Di luar rumah tangga, laki-laki mengendalikan dan membatasi peran publik perempuan. Gejala ini oleh Sylvia Walby disebut *mode produksi patriarkhat* yang merugikan kaum perempuan.¹ Dalam masyarakat Jawa, stereotip terhadap perempuan dapat dilihat pada ungkapan *swarga nunut neraka katut*. Karena nasib perempuan sangat bergantung pada suami maka kedudukan perempuan dipandang lebih rendah. Peran perempuan dibatasi pada tugas-tugas domestik, yaitu sekitar "sumur, dapur dan kasur". Peran ini dianggap sebagai hal ideal bagi seorang perempuan. Paradigma yang masih berakar kuat pada sebagian masyarakat Jawa dan penolakan pada stereotip tersebut terus berlangsung seiring dengan gerakan emansipasi wanita.

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat tentang perempuan. Di daerah perkotaan dan daerah-daerah yang intensif bersentuhan dengan perubahan sosial ekonomi, pandangan yang menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki lebih cepat berkembang. Berdasarkan perubahan persepsi itulah, keterlibatan perempuan dalam ranah publik makin besar. Dalam konteks tersebut, kaum perempuan tidak semata-mata bertanggungjawab terhadap urusan domestik sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi penentu kelangsungan hidup rumah tangga.

Keterlibatan istri nelayan pada wilayah publik dalam keluarga pesisir tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan hidup rumah tangga, peningkatan kapasitas diri, dan status sosial dalam struktur sosial masyarakatnya, tetapi memberi kontribusi terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, kaum perempuan (istri) tidak hanya menjadi potensi sosial budaya, akan tetapi juga sangat potensial dalam pengembangan ekonomi. Secara psikologis dinamika peran ini akan memberikan kepercayaan diri, motivasi serta penghargaan dan harga diri perempuan yang relatif sama dengan laki-laki. Pembagian kerja secara seksual ini tetap saja melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Realitas ini akan dijadikan bahan bandingan terhadap konteks pembagian kerja yang dibangun oleh kelompok budaya masyarakat Branta Pesisir, yang (dalam pengamatan awal) menyiratkan adanya pembakuan peran pada saat musim melaut yaitu laut adalah wilayah publik laki-laki dan darat adalah ranah publik

¹ Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm.25

perempuan dan sekaligus dinamikanya ketika suami tidak melaut.

Branta Pesisir : Wilayah Rekreasi dan Aktualisasi Bagi Perempuan

Pada awal abad ke 19, Branta Pesisir merupakan pelabuhan penting dalam peta perdagangan Madura. Daerah ini memiliki dermaga, tempat setiap kapal pengangkut barang singgah untuk memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat daerah pedalaman bagian tengah pulau Madura. Dengan adanya dermaga tersebut, Branta Pesisir merupakan tempat bagi peredaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Madura, khususnya Pamekasan. Menurut pitutur lisan dari sesepuh desa,² bahwa hampir setiap hari termasuk malam hari beberapa perahu mesin bersandar untuk menurunkan barang-barang kebutuhan pokok yang diangkut dari Surabaya, Besuki, Penarukan dan daerah lain di Jawa.

Daerah ini dikenal pula sebagai tempat yang indah untuk rekreasi, karena pasir putih terhampar mulai dari timur sampai barat desa. Setiap bulan purnama anak-anak laki-laki dan perempuan serta orang tua bermain serta bersenda gurau di pantai Branta Pesisir. Branta Pesisir tidak hanya ramai dengan keindahan pantai, karena daerah tersebut memiliki "Sekolah Rakyat (SR) Laten"³ yang

² Mat Samik (bukan nama sebenarnya), wawancara Jum'at, 31/11/08. Tulisan ini dikonstruksi dari cerita dan pengalaman informan yang dipadukan dengan dokumen sejarah, peta, majalah, serta buku-buku dan lain-lain.

³ Sekolah Rakyat (SR) Laten adalah sekolah yang didirikan Belanda. Konon, diberi nama "Laten" karena sekolah tersebut hanya mengajarkan huruf latin, tidak mengajarkan huruf Arab. Menurut ahli sejarah Madura sebagai bagian dari "politik etis", Belanda mendirikan sekolah (*volkschool*) di Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan.

dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Menurut sesepuh desa, sekolah ini turut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan di daerah Branta Pesisir. Meskipun kesadaran pendidikan masih menjadi bagian yang senantiasa pasang-surut, namun Pamekasan (kota Kresidenan) sebagai tempat pendidikan yang kondusif bagi keberlangsungan dunia pendidikan diakui sejak jaman Belanda.⁴ Branta Pesisir dipandang oleh Belanda sebagai daerah penting tidak hanya bagi perdagangan dan pendidikan, namun dalam beberapa dekade dan ratus tahun diharapkan akan menjadi "kota penting" di daerah Madura.⁵

Namun sejak pertengahan Orde Baru, ketika otoritarianisme negara mulai menunjukkan kekuasaan dan berkehendak berbeda dengan keinginan dan budaya serta kultur masyarakat, Branta Pesisir memilih sejarahnya sendiri. Branta yang awalnya memiliki hutan bakau dengan pasir yang terhampar dan terbentang indah dari ujung desa, dibagi menjadi dua desa, yakni Branta Tinggi dan Branta Pesisir. Keindahan seperti yang terlihat di masa lalu, kini Branta Pesisir menjadi penuh dengan tumpukan rumah (berdesak-desakan) dengan

Awalnya pendirian sekolah tersebut dimaksudkan agar anak-anak para penjajah bisa bersekolah di tempat jajahan, sedangkan para masyarakat pribumi kelas atas saja yang bisa sekolah seperti anak-anak raja dan priyayi. Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002)

⁴ Ibid.

⁵ Dalam perbincangan dengan tokoh masyarakat (27/10/08) Branta Pesisir adalah daerah penting bagi perdagangan dan pendidikan yang didesain dalam peta peninggalan Belanda akan menjadi daerah perkotaan dengan adanya pelabuhan, institusi pendidikan serta penjara.

jumlah penduduk yang sangat ramai. Namun tetap saja menjadi tempat yang menjanjikan bagi penduduknya dalam memberikan sejumlah kegiatan dan pekerjaan. Wilayah darat dan laut menjadi wilayah perpaduan yang menjanjikan untuk perbaikan kehidupan ekonomi keluarga. Laut menjadi sumber pekerjaan dan darat sebagai tempat pengolahan hasilnya.

Pengolahan hasil laut menjadi andalan penting bagi masyarakat Branta. Hal ini bermula dari kenyataan bahwa ada berbagai tempat di Madura sebagai sentra industri ikan, sehingga terkadang hasil tangkapan para nelayan tidak terserap pasar. Ikan yang tidak tahan lama kebanyakan dikeringkan sehingga dibungkus dan menjadi lauk-pauk yang memiliki daya tahan lama.⁶ *Home-industri* ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang berada di rumah sejak pagi hari. Mereka mengolah hasil laut di depan rumah, pinggir jalan, hingga lokasi pemakaman. Dalam konteks ini, perempuan Branta Pesisir menjadi bagian penting sebagai penggerak sektor ekonomi rumah tangga. Kreativitas perempuan dalam memodifikasi hasil tangkapan laut memberikan ilustrasi bahwa kehidupan masyarakat Branta Pesisir menjadi bagian penting bagi aktivitas, kreatifitas, dan aktualisasi kaum perempuan.

⁶ Menurut Salima –bukan nama sebenarnya-- bahwa penghasilan rumah tangga menjadi terdongkrak dengan adanya home-industri. Dalam satu bulan pengolahan ikan rumahan (home-industri) ini dapat menghasilkan 100-200 bungkus dengan masing-masing harga sebesar 30.000/bungkus. Sayangnya hasil dari home-industri ini tidak secara langsung dapat dinikmati para nelayan, karena ibu rumah tangga/perempuan menyeter hasil *home-industry* tersebut kepada para pengumpul/pengusaha.

Beban Ganda: Sebuah Pembebasan atau Beban Pembelenggu

Dalam konteks relasi suami-istri dalam keluarga terdapat dua wilayah peran yang diperhadapkan yaitu peran publik (*public role*) atau sektor publik (*public sphere*) dengan peran domestik (*domestic role*) atau sektor domestik (*domestic sphere*). Istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum laki-laki, sementara yang kedua dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Sekat budaya ini, menurut kaum feminis, merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Warisan ini selanjutnya diteruskan oleh masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) untuk mengurus keluarga. Demikian juga, dalam masyarakat modern, sekat budaya tersebut masih cenderung bertahan, terutama dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin seperti ini, bukan saja merugikan kaum perempuan itu sendiri⁷ namun juga sangat tidak relevan lagi untuk

⁷ Dalam studi yang menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan, *pertama*, terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan, *kedua*, terjadi subordinasi pada satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan, *ketiga*, pelabelan negatif terhadap (stereotipe) dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, *keempat*, kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya kepada perempuan, dan *kelima*, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Lihat, Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 72-75.

diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini.⁸

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam dua kategori besar; *pertama*, teori *nature*, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, sederet perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. *Kedua*, teori *nurture*, yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.⁹

Pemahaman ilmiah dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin tersebut menimbulkan perdebatan panjang, termasuk di kalangan ilmuwan-teolog dan feminis. Mereka memberikan andil penting dalam wacana ini karena penafsiran-penafsiran mereka terhadap kitab suci merujuk kepada kondisi objektif lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Tidak sedikit penafsiran mereka yang membenarkan konstruksi budaya yang hidup di dalam masyarakat. Namun sebaliknya, tidak sedikit konstruksi budaya dibangun di atas pemahaman kitab suci, misalnya persepsi al-Qur'an terhadap tiga hal pokok tentang perempuan. *Pertama*, tujuan

penciptaan perempuan untuk melengkapi kebutuhan laki-laki (Adam) di surga. Hal ini mengesankan bahwa perempuan hanyalah pelengkap dan diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki. *Kedua*, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ini mengesankan perempuan subordinat. *Ketiga*, perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga ke bumi. Hal ini mengesankan perempuan sebagai penyebab dosa warisan. Ketiga pemahaman tersebut membentuk persepsi yang mengendap di alam sadar masyarakat sehingga mereka memandang bahwa perempuan memang tidak pantas disejajarkan dengan laki-laki.¹⁰

Dalam pada itu, konsep gender (baca: relasi laki-laki dan perempuan) dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa gender dalam Islam tidak ada masalah, dan sebagian yang menganggapnya ada masalah tentang gender sudah saatnya digugat¹¹. Bila

¹⁰ Hidayatullah, "Al-Qur'an", hlm. 6

¹¹ Legitimasi ajaran agama terhadap tradisi patrialkhal dapat ditelusuri dalam dua perspektif, yaitu perspektif sosiologis dan teologis. Dalam perspektif sosiologis, relasi gender dipahami sebagai institusi sosial yang terorganisasi antara laki-laki dan perempuan yang meliputi hubungan personal dan kekeluargaan sampai hubungan institusi sosial yang lebih besar, hubungan hierarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan. Dalam hubungan ini, gender merupakan proses sosiologis yang dapat berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor pembentuknya. Masuknya tradisi patrialkhal berawal dari pemahaman gender yang tereduksi. Relasi gender dipahami sama dengan relasi seks. Kerangka berpikir *sex differences* yang diberlakukan sama dengan *gender differences* yang pada akhirnya akan melahirkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan dalam perspektif teologis meliputi legitimasi ajaran teologi dan tradisi keagamaan yang masuk dari wacana dinamis pembacaan teks keagamaan,

⁸ Syarif Hidayatullah " Al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan " dalam *Gender dan Islam : Teks dan Konteks*, ed. Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 5-7

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 4-7

dicermati, pangkal perbedaan pendapat mereka sebenarnya terletak pada masalah interpretasi ayat. Karena itu, persoalan krusial yang perlu dikaji adalah menimbang perspektif keislaman terhadap kedua pendapat tersebut.

Penafsiran terhadap al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 seringkali dijadikan landasan justifikatif "superioritas" laki-laki (suami) atas perempuan (istri). Kata *qawwâmûn* dalam ayat tersebut dipahami terlepas dari advokasi quranik lainnya tentang pembentukan kehidupan keluarga sehingga muncul pengakuan (*claim*) adanya relasi gender dalam lingkup domestik.¹² Padahal jika dihubungkan dalam kerangka pemahaman *ideal moral* al-Qur'an tentang tujuan perkawinan, tata pergaulan suami-istri dan tanggung jawab keluarga, maka pengakuan di atas merupakan akibat dari pemahaman simplistik-parsialistik (menyederhanakan dan tidak menyederhanakan) terhadap al-Qur'an. Dominannya pola pemahaman semacam ini turut andil menutupi "keluhuran" Islam orisinal dengan "bopeng" Islam historis. Lebih jauh dari pemahaman tersebut, al-Qur'an semestinya ditangkap makna substan-

sialnya sehingga selalu relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman.¹³

Al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang namun bagaimana agar adanya kewenangan manusia untuk menggunakan kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan, baik sektor domestik maupun sektor publik.¹⁴ Dalam konteks ini, terdapat beberapa alasan munculnya dorongan al-Qur'an ke arah kesetaraan perempuan dan laki-laki. *Pertama*, al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang meliputi perempuan dan laki-laki. *Kedua*, secara norma-etis al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perbedaan struktur biologis, menurut al-Qur'an, tidak berarti ketidaksetaraan dan status yang didasarkan pada jenis kelamin, melainkan terdapat perbedaan antara fungsi-fungsi biologis dengan fungsi-fungsi sosialnya.¹⁵

Dalam kaitan ini, Islam menegaskan prinsip-prinsip yang

yang terdapat dalam tradisi tafsir dan tradisi periwayatan tafsir. Dalam kedua tradisi tersebut ditemukan penafsiran yang patriarkhal seperti laki-laki adalah pemimpin wanita atau perempuan adalah sumber bencana. Lihat, Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminesme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 4-5

¹² Munculnya penafsiran biar gender boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan laki-laki dan perempuan; *kedua*, pengaruh kisah-kisah israiliyat; *ketiga*, menggunakan pendekatan tekstualistik; dan *keempat*, pembacaan terhadap ayat-ayat gender secara parsial. Lihat Umar, *Argumen*, hlm. 21

¹³ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 20

¹⁴ Nabi secara radikal telah mendobrak pengurungan perempuan hanya sebagai makhluk domestik saja dan ini telah dilakukan oleh umat awal. Dengan anjuran menuntut ilmu mengindikasikan bahwa Nabi membuka ruang publik sebagai ajang bagi kehidupan laki-laki maupun perempuan. Ajang pengamatan ilmu adalah kehidupan bersama, kehidupan publik yang tidak mungkin dibatasi. Karena itu membatasi ruang gerak perempuan hanya dalam ruang tembok rumah saja dan menganggapnya sebagai dogma agama adalah tidak berdasar. Lihat Masdar F. Masudi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 56

¹⁵ Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 34

mendukung eksistensi keadilan gender, yaitu: *Pertama*, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang dan potensi untuk menjadi hamba Allah yang ideal, mencapai derajat puncak spiritualitas yang paling tinggi yakni muttaqin. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai khalifah Allah di bumi yang sama-sama memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima dan mengemban amanah primordial. *Keempat*, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis. Dan *kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi.¹⁶

Satu contoh kesetaraan peran publik perempuan adalah wacana perempuan menjadi kepala negara. Diakui secara mutlak, bahwa dalam diskursus ini memang tidak ada pernyataan langsung dari al-Qur'an tentang peran publik perempuan, akan tetapi juga sebaliknya tidak ditemukan secara tegas menyatakan penolakan terhadap kekuasaan Ratu Saba sebagai pemimpin Yaman Selatan. Bahkan, dalam al-Qur'an, Ratu Saba digambarkan sebagai Ratu yang independen, tidak terpengaruh dari pejabat laki-laki dalam mengambil kebijakan politiknya, Ratu yang sah dan bijaksana. Dengan demikian, al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan dalam berbagai terminologi kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal. Keseluruhan spirit Islam secara umum sangat menegaskan kesetaraan kedua jenis seks tersebut baik dalam status, posisi dan nilai.

Dari pola pikir di atas, perempuan harus memainkan peranan

yang lebih besar dalam era ekonomi industri modern karena tidak ada ajaran al-Qur'an yang menghalangi perempuan bekerja dan bahkan dianjurkan untuk memperkuat kiprah publiknya. Implikasinya, perempuan memiliki beban ganda (*double burden*), beban yang muncul dari peran domestiknya sekaligus beban baru yang diperkuat dalam ranah publiknya. Dari satu sisi, perempuan perlu berusaha sendiri, tetapi di sisi lain harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga.¹⁷ Sekalipun demikian, perlu dikaji lebih mendalam apakah peran (ganda) tersebut dapat memberikan kebebasan kepada perempuan, atau bahkan semakin menjadi beban yang membelenggu.

Konteks tersebut perlu dilihat dengan teori perbedaan antara teks dan realitas dan teori perbedaan antar nilai dan realitas. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menguji sejauh mana teks-teks dan nilai-nilai yang adil gender tersebut diaplikasikan dalam realitas masyarakat pesisir Madura sehingga dapat terlihat terjadinya dinamika peran dan relasi antara suami dan istri. Meskipun demikian, melihat peran publik perempuan, dalam lintasan sejarah dan budaya, pembagian kerja secara seksual selalu ditemukan sehingga Michelle Rosaldo dan Louise Lamphere mengidentifikasikannya berdasarkan ciri-ciri universal dalam berbagai kelompok budaya.¹⁸

¹⁷ Ibid, hlm. 76

¹⁸ Terdapat berbagai kelompok budaya yang memiliki karakteristiknya sendiri: *Pertama*, masyarakat pemburu dan peramu. Dalam kelompok masyarakat ini, semakin besar jumlah hasil buruan semakin besar pula kekuasaan yang diperoleh laki-laki. *Kedua*, masyarakat holtikultura, yang pola relasi gendernya memiliki keseimbangan, hanya saja peran politiknya masih didominasi laki-laki. *Ketiga*, masyarakat agraris.

¹⁶ Umar, *Argumen*, hlm. 247-263

Domestik dan Publik; Antara Pertukaran, Permainan dan Pengaturan Peran

Dalam budaya masyarakat patriarkat,¹⁹ perempuan (istri nelayan) dianggap makhluk kedua. Perempuan tetap didominasi dan disubordinasi oleh sistem baik yang berdasar dari penafsiran berbagai teks keagamaan²⁰ maupun dari produk budaya masyarakat. Kekuasaan laki-laki menjadi absolut dan sulit dibatasi dengan argumentasi yang rasional. Laki-laki dapat senantiasa menjadi sumber utama dalam keluarga. Kuasa laki-laki memperingatkan akan ketidakbermaknaan perempuan, bahkan tidak jarang mereka menjadikan suara

utama laki-laki dalam keluarga.²¹ Arus utama dalam masyarakat patriarkat menjadi sistem yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama.²² Perempuan menjadi bagian dari realitas penindasan dan dehumanisasi pada masyarakat patriarkat.

Sekalipun demikian, perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi menjadi bagian utama dalam realitas masyarakat Branta Pesisir. Kekuasaan laki-laki menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari realitas dan kebudayaan yang berubah. Kekuatan realitas ini berhadapan dengan teks dan tafsir yang tidak berkembang serta senantiasa tidak bergerak dari realitas yang makin dinamis. Kekuatan dan kekuasaan laki-laki menjadi unsur dialogis antara realitas dan teks, sehingga tidak mengherankan dalam masyarakat Branta Pesisir telah terbentuk pemahaman bahwa masyarakat dapat "*menabrak ortodoksi dengan menakar realitas*".

Istri nelayan bekerja merupakan realitas yang telah berlangsung lama dan menginjak kurun waktu yang tidak bisa dihitung.²³ Dinamika sejarah keluarga nelayan Branta Pesisir menyiasati ortodoksi termasuk norma-norma dan ajaran keagamaan dengan memadukan dengan realitas masyarakat Branta Pesisir. Bagi masyarakat nelayan, istri bekerja (bahkan dengan kemauan sendiri) merupakan karunia yang patut disyukuri,

Dalam masyarakat agraris, pola relasi gendernya ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarki, peranan laki-laki lebih besar dari perempuannya. Dan *keempat*, masyarakat industri. Dalam kelompok masyarakat ini, meskipun perempuan diberikan peluang berkisah di sektor publik, akan tetapi persyaratannya cukup berat karena peran reproduksinya tidak dianggap sebagai peran ekonomi (*uneconomic role*) sehingga standar yang digunakan adalah standar ganda, karena itu dianggap sebagai era baru sistem patriarki (*the neopatriarchal era*). Ibid, hlm 80-84.

¹⁹ Kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau "*patriarkh (patriarch)*". Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki" yaitu rumah tangga besar patriarkh yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan laki-laki. Istilah ini kemudian dipergunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Kamla Bahsin, *Menggugat Patriarki*, (Jogyakarta: Kalyanamitra dan Bentang, 1996), hlm.1

²⁰ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995).

²¹ Penelitian Helen Bouvier menemukan bahwa ketika mereka (perempuan) Madura dimintai pendapat, laki-laki menjadi "juru bicara", sementara suara perempuan diwakilkan (dengan terpaksa) kepada laki-laki. Helen Bouvier, *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris dan Yayasan Obor, 2002)

²² Kamla Bahsin, *Menggugat Patriarki*, hlm. xi

²³ Wawancara H. Subhan (65 tahun) (bukan nama sebenarnya)

bahkan dengan penuh kerelaan jika dalam rumah tangga ada kekurangan "belanja dapur", perempuan akan mencari di daerah pelabuhan baik dengan menjadi kuli pengangkut maupun mengangkat bak berisi ikan.²⁴

Dalam konsep ini tidak memungkinkan teks mewakili seluruh konteks. Dalam pada itu diperlukan adanya interpretasi terhadap teks dengan takaran realitas dan kebudayaan masyarakat Branta Pesisir. Meskipun *tafsir* terhadap teks senantiasa memenangkan teks itu sebagai rujukan utama dalam pemahaman hukum (Islam), akan tetapi ada justifikasi terhadap realitas perempuan bekerja.²⁵ *Tafsir* realitas ini memungkinkan istri nelayan bekerja dengan tenggang waktu yang relatif banyak melebihi waktu bekerja kaum laki-laki. Pada pagi hari perempuan/istri nelayan biasanya telah bersiap dengan segenap pekerjaan rumah mulai dari mencuci, memasak, memandikan anak, serta mengantarkan sekolah. Tidak jarang pekerjaan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara mengolah ikan dengan menge-ringkannya di tempat pengeringan sambil mengasuh anak-anak mereka. Sekitar jam satu hingga sore hari, istri nelayan menanti suami yang bekerja

melaut dengan menghitung hasil, menjual ataupun menjadikan ikan tersebut sebagai bahan olahan. Pada malam hari, perempuan mengikuti acara-acara sosial keagamaan, misalnya kegiatan pembacaan yasin, dhiba' dan lain sebagainya.

Berbeda dengan laki-laki yang memiliki batas dan ruang bekerja yang lebih sempit, perempuan/istri dalam masyarakat pesisir memiliki ruang publik (*public-sphere*) yang lebih luas. Mereka tidak hanya bekerja dalam sektor rumah tangga (*homing*), namun juga bekerja sebagai bagian dari pekerjaan ibu (*mothering*) serta pekerjaan yang dianggap dalam sektor publik (*public*). Bagi tokoh agama pekerjaan yang dilakoni perempuan tersebut tidak menjadi persoalan penting yang paling penting bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ekonomi rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Branta Pesisir, pekerjaan suami dan istri terbagi secara sama dan adil. Karena dianggap pekerjaan berat, yakni melaut, setelah melaut, menyandarkan dan membersihkan kapalnya, mereka direlakan bersantai sebab mereka dianggap telah memenuhi nafkah lahir bagi keluarga. Secara sadar para istri mengambil peran yang lain yaitu memanfaatkan hasil laut suami untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Bagi masyarakat hal ini merupakan hal biasa (istri mengerjakan pekerjaan yang dikonstruksikan sebagai peran suami). Keterlibatan istri dengan membantu suami akan mendapatkan barakah peningkatan kesejahteraan hidup dan sesuai dengan tuntunan agama (Islâm). Pemahaman ini berangkat dari realitas masyarakat pesisir yang keras dan penuh dengan persaingan. Tidak jarang perempuan menjadi tulang

²⁴Hal ini dilakukan karena perempuan yang bekerja di daerah pelabuhan/dermaga ikan akan lebih mudah memperoleh penghasilan (uang) daripada laki-laki. Paradigma ini didasarkan pada realitas bahwa perempuan/istri memiliki wilayah kekuasaan di daratan, sedangkan laki-laki lebih pantas bekerja di lautan.

²⁵ Wawancara Ustadz Salim (50 tahun). Tokoh masyarakat ini mengatakan bahwa perempuan/istri yang bekerja dibolehkan karena ada beberapa alasan yakni perempuan/istri tersebut tidak mungkin "ditaksir" orang lain dan kedua, *ekabunga* karena menambah penghasilan, *ketiga*, janda

panggung keluarga, karena istri dianggap lebih mudah mencari nafkah daripada suami.

Pola pembagian kerja bagi perempuan/istri dan laki-laki/suami pada masyarakat nelayan terfragmentasi dengan jelas. Untuk kaum perempuan misalnya, pada waktu pagi antara jam 05.00 sampai 12.00, mereka melakukan kegiatan mencuci, memasak, memandikan anak, mengantar sekolah, mengolah ikan, pada waktu siang antara jam 12.00 sampai 18.00, mereka bekerja di dermaga ikan menjadi pengangkut (*panglako*), penjual ikan, *balijjha*, buruh (*public*), dan pada waktu malam antara jam 18.00 sampai 22.00 mereka ikut kompolan serta pertemuan perempuan, menemani anak belajar (*mothering/homing dan public*). Untuk kaum laki-laki pada waktu pagi antara jam 05.00 sampai 12.00, mereka melaut, istirahat, mencuci kapal (dilakukan setiap selesai melaut) memperbaiki kapal (dilakukan satu minggu sekali terutama hari Jumat karena tidak melaut), pada waktu siang antara jam 12.00 sampai 18.00, mereka beristirahat setelah melaut, berkumpul dengan anak (menemani, memberi makan dan mengajak main) dan pada waktu malam antara jam 18.00 sampai 22.00 mereka mengikuti kegiatan pertemuan, dan silaturahmi.

Pola pembagian tersebut dapat menembus batas-batas jenis kelamin dan gender. Sejak pagi hari buta—sebelum matahari terbit—baik pada istri maupun suami memiliki aktivitas yang padat. Perbedaan antara keduanya bahwa istri lebih berhubungan pada pekerjaan yang disandarkan kepada pekerjaan ibu,²⁶ atau

mothering serta pekerjaan yang berkenaan dengan rumah. Sejak menjadi ibu dalam rumah tangga, segenap pekerjaan rumah dan ibu dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.²⁷ Tidak terkecuali pekerjaan yang lebih mengarah kepada sektor publik dilakoni sebagai bagian dari pekerjaan istri. Aktivitas semakin padat menjelang siang hingga malam hari. Aktivitas yang bersifat *mothering, homing dan public* menjadi bagian yang *inheren* lekat dari pekerjaan perempuan bahkan seringkali dikerjakan secara bersamaan. Dalam konteks ini kekuatan perempuan seolah melebihi kekuatan laki-laki. Jika dibedakan dari matriks tersebut akan tampak bahwa laki-laki/suami yang berprofesi sebagai nelayan memiliki waktu luang yang lebih luas daripada perempuan sehingga tidak menghemakan waktu istirahat lebih banyak daripada waktu bekerja, sehingga kadangkala pada saat di darat pekerjaan istri diambil alih oleh suami.

Pola Pembagian Kerja Suami-Istri

Pola pembagian kerja secara seksual yang berlaku di masyarakat nelayan Branta Pesisir adalah pola pembakuan wilayah peran ekonomik. Dalam pola tersebut, tugas-tugas di darat sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan. Sedangkan laut merupakan ranah laki-laki. Karena itu, pola tersebut telah memberikan peluang yang besar bagi perempuan untuk terlibat secara intensif dalam kegiatan publik (darat) sehingga segala kegiatan yang ada di darat sepenuhnya menjadi tanggung-jawab istri dan laut menjadi wilayah kerja suami. Dalam wilayah laut tersebut tidak

²⁶ Anke Niehof, *The Changing Lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure* (Leiden: KILV, 1998), 246-253.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 245

satu pun ditemukan perempuan terlibat, mayoritas adalah kaum laki-laki.²⁸

Demikian juga, pengakuan seorang istri juragan yang sedang menunggu kedatangan perahunya. Dalam pengakuannya, dia menyatakan bahwa istri nelayan bekerja menjual ikan merupakan suatu kelaziman dari tradisi zaman dulu, demikian juga bagi laki-laki yang harus melaut mencari ikan demi menghidupi keluarganya.

Biasanya, para nelayan (laki-laki) melaut selama 12 jam. Ada yang berangkat pukul 02.00 dini hari dan kembali pada pukul 14.00 dan ada juga yang berangkat pukul 16.00 kembali pukul 4.00 pagi hari. Semuanya bergantung pada kondisi alam yaitu ketika gelap bulan (*pettengan*). Setelah mereka datang membawa ikan bukan berarti tugas lautnya selesai, akan tetapi mereka harus terlebih dahulu menyandarkan perahunya sampai aman, lalu membersihkan dan mengecek kembali kondisi perahunya sampai ada kepastian bisa melaut kembali.

Dalam pekerjaan laut terdapat sedikitnya 3 macam perahu, yaitu perahu *bentangan* (*pancingan*), perahu *gardan* dan perahu *slerek*. Perahu model pertama adalah perahu kecil pencari ikan hanya di pinggir pantai. Perahu model ini hanya membutuhkan 1 sampai 2 orang nelayan. Karena jarak tempuh yang tidak jauh dan terbatasnya tenaga dan alat yang digunakan, maka ikan yang diperolehnya juga terbatas. Perahu model kedua adalah perahu yang membutuhkan tenaga 6 sampai 8 orang nelayan. Perahu model ini bentuknya agak besar dan jarak tempuh yang digunakan agak jauh sehingga membutuhkan waktu 12 jam. Ikan yang

diperolehnya pun -kalau mujur- lumayan banyak. Sedangkan perahu model ketiga adalah perahu besar yang membutuhkan tenaga hampai mencapai 30 orang lebih. Jarak dan waktu yang dibutuhkan relatif lama serta ikan yang diperolehnya -kalau beruntung- sangat banyak. Mayoritas masyarakat Branta Pesisir adalah nelayan sehingga jumlah perahu yang ada sangat banyak mencapai 60 perahu lebih.

Dengan demikian, laut bagi masyarakat Branta Pesisir merupakan ruang kerja bagi laki-laki dan darat menjadi wilayah kerja perempuan. Pola pembagian kerja semacam ini sudah berlangsung lama yang berlaku secara turun temurun. Di samping pola tersebut, juga berkembang pola dikotomi peran sosial kemasyarakatan. Dalam pola ini, istri akan melakukan peran secara bersamaan, baik peran domestik maupun peran publik terutama jika suami berada di Laut. Sedangkan apabila dilihat pola dinamika peran sosialnya, maka suami istri telah melakukan pola pembagian kerja secara adil.

Perempuan Pesisir dalam Perspektif Gender Equality

Keterlibatan istri nelayan Branta Pesisir dalam kegiatan publik dipersepsi secara positif oleh sebagian besar masyarakat. Persepsi ini terkategori pandangan yang kontekstual dinamis berdasar *gender equality*. Pandangan ini lebih rasional dalam menilai perempuan pesisir yang bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonominya. Pandangan ini memberikan pandangan yang luas bagi istri nelayan untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik dengan tidak mengorbankan tanggung jawab domestiknya.

Dalam konteks tersebut, dasar keterlibatan mereka (istri-istri nelayan)

²⁸ Sebagaimana pernyataan H. Zaini, salah satu juragan ikan di desa Branta Pesisir

adalah kesadaran dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak suami. Sementara suami memberikan restu atas peran publik istri dengan dasar bahwa pendapatannya yang tidak pasti (kadang dapat dan kadang tidak dapat apa-apa) sehingga kebutuhan hidupnya kurang mencukupi. Karena itu, salah satu jalan untuk mengatasi keterbatasan ekonomi mereka adalah melibatkan dan merestui istri-istri nelayan bekerja di sektor publik.²⁹

Keterlibatan istri dalam dunia publik, khususnya bekerja yang berkaitan dengan ikan baik menjual, menjemur, mengelola hasilnya (*home industry*), maupun yang lainnya, menjadi kebanggaan bagi suami. Ini disebabkan keterlibatan tersebut dapat memberi kontribusi yang bermakna bagi keluarga mereka dan dapat menopang derajat ekonomi serta kelangsungan hidup mereka sehingga kesejahteraan hidupnya menjadi meningkat.³⁰

²⁹ Sebagaimana penuturan seorang tokoh, Ustadz Asnawi, berikut: “*Menorot pandangan kaule tak anapa babine’ alako ajual juko’ napapole tak e alang sareng se lake’. Molae dimin ampon daddi biasa bine’an ajual juko e ka’dhinto*”. (Menurut pendapat saya, tidak apa-apa istri nelayan bekerja menjual ikan apalagi tidak dilarang oleh suaminya. Dari dulu sudah menjadi kebiasaan, istri-istri nelayan bekerja menjual ikan). Wawancara dilakukan di rumahnya sehabis salat jum’at, tanggal 31 Oktober 2008 pukul 13.30.

³⁰ Pandangan ini disampaikan oleh seorang Ustadz, Salam, berikut: “*Bine’an alako eka’dhinto ekabunga sareng lakena polaepon penghaselan epon bisa atambe, daddi menorot kaule tak anapa. Napapole bine’an se alako lakar se tak ekabetere bisa e ganggu orang laen*”. (Istri nelayan bekerja dapat menjadi kebanggaan bagi suami karena penghasilannya dapat menambah income ekonomi keluarga. Apalagi istri-istri yang bekerja tidak dikhawatirkan diganggu oleh orang lain). Wawancara dilakukan di rumahnya, tanggal 12 November 2008 pukul. 11.30.

Tuntutan ekonomi menyebabkan istri nelayan harus terlibat dalam wilayah publik. Ini dapat dipahami karena sebenarnya dalam Islam tidak ada pembatasan yang tegas dan dikotomik antara ruang gerak istri dan suami dalam menjalankan kegiatan publik asalkan tidak dalam rangka melakukan maksiat dan melanggar ajaran Islam. Pandangan semacam ini merupakan pendapat yang berdasarkan pada realitas masyarakat Branta Pesisir yang memiliki kesadaran baru yang adil gender. Prinsip-prinsip kesamaan dan kesetaraan peran benar-benar terlihat dalam pergaulan mereka. Ini dibuktikan karena beberapa hal, yaitu; *pertama*, adanya kesadaran dan kemauan istri dalam bekerja untuk memenuhi dan menopang kebutuhan keluarga, *kedua*, tidak adanya pembatasan ruang gerak istri dan suami dalam menjalankan kegiatan publik, *ketiga*, adanya kesamaan peluang antara suami dan istri dalam bekerja dan *keempat*, adanya kesetaraan peran antara istri dan suami dalam menopang ekonomi keluarga. Pandangan semacam ini dinyatakan oleh lima orang ustaz, Nasrun, Ali Baba, Mannan, Rahman dan Fannan.³¹

Penutup

Perempuan seringkali diidentifikasi sebagai makhluk kedua. Pendakwaan sejarah (*historical-claims*) ini diperkuat dengan semakin terfokusnya struktur dalam masyarakat bahwa perempuan selalu dijadikan *konco-winking*, teman belakang. Di balik itu perempuan adalah realitas kehidupan yang menjadi subordinat dari berbagai kepentingan, termasuk penafsiran agama

³¹ Wawancara dikemas dalam bentuk diskusi dilakukan di emperan masjid al-Amin sehabis salat Jum’at tanggal 31 Oktober 2008, pukul 13.00 Wib.

yang "dipelintir" demi kepentingan sesaat. Perempuan seolah tidak memiliki ruang personal yang asasi untuk mengaktualisasikan kapabilitasnya. Bagi istri-istri nelayan Branta Pesisir Pamekasan Madura, upaya untuk meningkatkan derajat ekonomi dan taraf hidupnya tidak bisa dipadamkan hanya dengan penafsiran yang sempit, ia hendaknya menjadi bagian dari proses pemberdayaan secara individual dan masyarakat. Tuntutan agar bisa bertahan hidup menyebabkan mereka harus secara sadar dan mandiri terlibat dalam kegiatan publik. Untuk itu mereka harus membaginya secara adil, darat menjadi wilayah istri dan laut menjadi wilayah suami. Pola pembagian wilayah kerja ini memunculkan dinamika peran dan relasi suami-istri. Pada suatu saat istri memerankan diri di wilayah publik dan domestik secara bersamaan dan saat yang lain pada waktu istri berperan di wilayah publik, wilayah domestiknya diperankan oleh keluarga dekat (Bapak/Ibu atau keluarga yang lain) saat suami melaut atau bahkan suaminya ketika tidak melaut. Keterlibatan istri nelayan Branta Pesisir dalam wilayah publik dilatari beberapa faktor, yaitu; faktor derajat ekonomi keluarga diantaranya adalah adanya kesamaan peluang kerja antara suami dan istri, adanya ketersediaan sumberdaya, dan adanya pemahaman yang sama antara suami dan istri tentang tanggungjawab ekonomi keluarga; dan faktor kesadaran mereka untuk meningkatkan taraf hidup keluarga/anak keturunannya *Wa Allâh a`lam bi al-Sawâb* □

Daftar Pustaka

- Bahsin, Kamla. *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Kalyanamitra dan Bentang, 1996.
- Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982
- Engineer, Ali Asghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faqih, Mansour. "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan Di Lembaran Kitab Suci: Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Religia, 2005
- Ilyas, Hamim. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003
- Kadariusman. *Agama, Relasi Gender dan Feminesme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama' Madura*. Yogyakarta: UGM Press, 1990.
- Mas'udi, Masdar F. "Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Megawangi, Ratna. "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan

- Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman" dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mernissi, Fatima dan Hassan, Riffat. *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995.
- Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Mulia, Musdah. *Perempuan Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* Bandung: Mizan, 2005.
- Nurbakhsh, Javad. *Sufi Women*. London: Yale University Press, 1983
- Rosemarie Putnang Tong. *Feminist Thought*. Terj. Aquarini P. Yogyakarta: JALASUTRA, 1998
- Schimmel, Annemarie. *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam*. Bandung: Mizan, 1998
- Smith, Margaret. *Rabi'ah: Pergulatan Spiritual Perempuan*. terj. Jamilah Baraja. Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- Subhan, Arief, et al. *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003.
- Umar, Nasaruddin. "Perspektif Jender dalam Islam," *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1 Nomor 1, (Juli-Desember 1998)
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Water, Malcolm. *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publications, 1994.

